

# BAB II PERENCANAAN KINERJA

## 2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Bappeda sebagai coordinator perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk selalu tanggap dan responsive terhadap dinamika serta perubahan-perubahan yang terjadi baik secara internal wilayah maupun secara eksternal. Disamping itu, Bappeda juga dituntut untuk mampu menerapkan berbagai pendekatan perencanaan dalam konteks dan waktu yang tepat untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan kebutuhan berbagai kelompok atau pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Bappeda sebagai perangkat daerah di Kota Bima. Berkaitan dengan hal tersebut telah merumuskan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai sebagai bagian dari perwujudan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Bappeda Kota Bima Tahun telah merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran sampaitahun2018 sebagaimana yang telah tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kota Bima 2013-2018. Adapun visi Bappeda Kota Bima adalah:

**”Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif, dan visioner”.**

Visi tersebut merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Bappeda Kota Bima sebagai suatu lembaga perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam 3 (tiga) uraian misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran strategis.

Rumusan misi Bappeda Kota Bima adalah:

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
- b. Mewujudkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang efektif.
- c. Meningkatkan kualitas data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Visi dan misi yang sudah dirumuskan perlu dilengkapi dengan tujuan, sasaran serta indikator kinerja untuk memudahkan langkah pelaksanaannya maupun pengukuran hasil atau tingkat capaian dari visi dan misi tersebut.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kota Bima beserta indikator kinerja setiap tahunnya disajikan sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1.  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan  
Bappeda Kota Bima

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Terwujudnya perencanaan yang terintegrasi	Persentase SKPD yang dokumen perencanaannya selaras dengan RPJMD	50%	60%	70%	85%	100%
		Persentase program RKPd yang selaras dengan RPJMD	60%	70%	80%	100%	100%
		Persentase dokumen RKPd dalam KUA PPAS	70%	80%	100%	100%	100%
		Persentase dokumen KUAPPAS kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sektor strategis	Persentase perencanaan SKPD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PerPres 29/2014, Tahun Permen PAN 53/2014, Permendagri 54/2010)	40%	50%	75%	85%	100%
		Persentase dokumen perencanaan strategis SKPD dalam RKPd	30%	40%	50%	60%	70%
3.	Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat.	Persentase keterisian elemen data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana amanat Permendagri Nomor 8 Tahun 2014.	50%	55%	60%	70%	80%
		Persentase peningkatan keterisian SIPD oleh SKPD	20%	30%	40%	50%	60%

## 2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

Bappeda Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) tahun 2016 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis

organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Bima Tahun 2013-2018. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Bima.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Bima Tahun 2016 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2.  
Penjelasan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
1.	Terwujudnya perencanaan yang terintegrasi	Persentase SKPD yang dokumen perencanaan nyaselaras dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah program Renstra SKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$
		Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$
		Persentase dokumen RKPD dalam KUA PPAS	$\frac{\text{Jumlah program KUA PPAS Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$
		Persentase dokumen KUA PPAS kedalam APBD	$\frac{\text{Jumlah program APBD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program KUA PPAS yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sektor strategis	Persentase dokumen perencanaan yang sesuai dengan ketentuan berlaku	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan seluruhnya}} \times 100\%$
		Persentase dokumen perencanaan strategis SKPD dalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah urusan yang memiliki dokumen perencanaan strategis}}{\text{Jumlah urusan dalam RKPD}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya system informasi data dan data pembangunan	Persentase keterisian elemen data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana amanat Permendagri Nomor 8 Tahun 2014.	<b>Formulasi Penghitungan</b> : Persentase keterisian elemen data Sistem Informasi Pembangunan Daerah /SIPD online ( <a href="http://www.sipd.bangda.kemendagri.go.id">www.sipd.bangda.kemendagri.go.id</a> ); <b>Tipe Penghitungan</b> : kumulatif
		Persentase peningkatan keterisian SIPD oleh SKPD	<b>Formulasi Penghitungan</b> : Persentase keterisian data SKPD dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah /jumlah total SKPD

### 2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kota Bima tahun 2016 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Bima Tahun 2013-2018 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda tahun 2016.

Tabel 2.3.  
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kota Bima Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya perencanaan yang terintegrasi	Persentase SKPD yang dokumen perencanaannya selaras dengan RPJMD	70%
		Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD	80%
		Persentase dokumen RKPD dalam KUA PPAS	100%
		Persentase dokumen KUAPPAS kedalam APBD	100%
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sektor strategis	Persentase perencanaan SKPD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PerPres 29/2014, Tahun Permen PAN 53/2014, Permendagri 54/2010)	75%
		Persentase dokumen perencanaan strategis SKPD dalam RKPD	50%
3.	Meningkatnya system data dan informasi pembangunan	Persentase keterisian elemen data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana amanat Permendagri Nomor 8 Tahun 2014.	60%
		Persentase peningkatan keterisian SIPD oleh SKPD	40%

### 2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen

penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsian wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala Bappeda Kota Bima, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

- a. sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Bappeda Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
- d. sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Bima pada awal tahun 2016 terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja utama dengan anggaran sebesar Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 10 (sepuluh) program dengan total anggaran sebesar Rp5.378.831.100,00.

Tabel 2.4.  
Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya perencanaan yang terintegrasi	Persentase SKPD yang dokumen perencanaannya selaras dengan RPJMD	70%
		Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD	80%
		Persentase dokumen RKPD dalam KUA PPAS	100%
		Persentase dokumen KUA PPAS ke dalam APBD	100%
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sektor strategis	Persentase perencanaan SKPD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PerPres 29/2014, Tahun PermenPAN 53/2014, Permendagri 54/2010)	75%

		Persentase dokumen perencanaan strategis SKPD dalam RKPD	50%
3.	Meningkatnya system data dan informasi pembangunan	Persentase keterisian elemen data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana amanat Permendagri Nomor 8 Tahun 2014.	60%
		Persentase peningkatan keterisian SIPD oleh SKPD	40%

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 198.794.500,00	APBD
2. Program Pengembangan Data/Informasi	Rp. 314.335.000,00	APBD
3. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah	Rp. 75.845.000,00	APBD
4. Program Kerjasama Pembangunan	Rp. 351.744.750,00	APBD
5. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Rp. 142.9600.000,00	APBD
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 174.295.000,00	APBD
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.456.513.250,00	APBD
8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 370.975.000,00	APBD
9. Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp. 713.450.000,00	APBD
10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam	Rp. 293.278.600,00	APBD